

RENJA TAHUN 2024



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)



JI. KABUPATEN II No. 1 APO – DISTRIK JAYAPURA UTARA
Website bp2tsp.jayapura.go.id
Email: bpptsp_jayapurakota@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunianya Review Dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura Tahun 2024, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk pedoman Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu satu Pintu Kota Jayapura dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura Tahun 2023-2026

Semoga dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Jayapura.

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kota Jayapura



EILLET C. HAMADI, SE
Pengguna TK. I (IV/b)
NIP. 19771025 200301 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN.	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	6
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	8
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	13
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	15
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	20
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	22
3.3 Program dan Kegiatan	23
BAB IV PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA SKPD Dan Pencapaian RESTRA SKPD s/d Tahun 2022.....	6
Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Jayapura.....	7
Tabel 2.3 Reviuw RKPD.....	13
Tabel 2.4 Usulan Program/Kegiatan DPMPTSP Kota Jayapura.....	17
Tabel 3.1 Rencana Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan DPMPTSP Tahun 2024.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimanan tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura Tahun 2023 memuat program dan kegiatan Tahun 2024, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran , pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2024.

Penyusunan Renja mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura 2024 merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi pembangunan yang termuat dalam RKPD Kota Jayapura Tahun 2024, dan akan menjadi bagian dari Renstra DPMPTSP Kota Jayapura yang akan disusun, seiring dengan revisi RPJMD Tahun 2023 – 2026 karena adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah sesuai Perda Kota Kota Jayapura yang akan disusun, seiring dengan RPJMD Tahun 2023 – 2026 karena adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah sesuai Perda Kota Jayapura Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya Renja DPM PTSP Kota Jayapura 2024 ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan RAPBD yaitu penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP Kota Jayapura Tahun 2024.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, beberapa istilah/pengertian dalam sistem pembangunan yaitu :

- a. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- b. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
- c. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.
- d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan.
- f. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (RENJA) adalah rencana pembangunan tahunan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura yang disusun berdasarkan Restra DPMPTSP dan RPJMD Kota Jayapura Tahun 2023-2026, yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan.
- g. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- h. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- i. Strategis adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
- j. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
- k. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan dengan instansi pemerintah.
- l. Kegiatan adalah pelaksanaan program secara rinci sesuai dengan kebutuhan dan prioritas satuan perangkat daerah (OPD).

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renja DPMPTSP Kota Jayapura Tahun 2020 adalah :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu SatuPintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Korifikasi dan Nomenklator Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Evaluasi dan Pemutahiran.
7. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Jayapura 115 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Jayapura Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura;
9. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jayapura;
10. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Jayapura;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura Tahun 2024 adalah untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang penanaman modal dan bidang perizinan.

Tujuan penyusunan Renja adalah untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 serta proyeksi tahun 2024.
2. Sebagai sarana untuk mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja.

3. Mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
4. Sebagai acuan dalam penyusunan RKA DPMPSTSP Kota Jayapura Tahun 2024.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renja 2024 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022

Guna mengevaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan capaian Restra Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2022. Untuk mengevaluasi Anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Jayapura Tahun 2022 serta capaian target capaian pada tahun 2022.

Evaluasi dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan sehingga program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Evaluasi yang dilakukan meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi sehingga diharapkan tercapainya konsistensi antar kebijakan baik makro dan mikro, kebijakan dan pelaksanaan, penyelarasan program dan perencanaan serta tercapainya efektifitas perencanaan.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA SKPD dan Pencapaian RESTRA SKPD s/d Tahun 2022

1. Analisa Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Jayapura

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Jayapura Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura maka fungsi yang harus dilaksanakan adalah melakukan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan Layanan, serta Pengelolaan Data dan Informasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut maka penjabaran antara Indikator Sasaran dengan Target dan Realisasi Capaian dalam Renstra DPMPTSP Kota Jayapura 2022 sebagaimana Tabel 2.2 sebagai berikut

Tabel 2.2

Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Jayapura

No	Indikator	SMP /Standar Nasional	IKK	Target DPMPTSP		Realisasi Capaian		Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
				2021	2022	2021	2022	
1	Meningkatnya Jumlah Investor PMA dan PMDN			PMA = 26 Investor	PMA = 26 Investor	3	39	PMA = 150
				PMDN = 6.908 Investor	PMDN = 8.421 Investor	2.913	14.315	PMDN = 170.17
	Meningkatnya Nilai Investasi PMA dan PMDN Berskala Nasional			PMA= 59.997 juta	PMA= 73.330 juta	65,776,539,065	11.428.631.301.266	PMA = 17.274
				PMDN = 8.098 Milyar	PMDN = 9.768 Milyar	2,610,315,377,828	12.033.966.147.034	PMDN = 361.02
	Prosesntasi Kenaikan Nilai Investasi PMDN yang berskala Nasional			0,4% atau 1,670 Milyar	0,4% atau 1,670 Milyar	2.676 Milyar	80,95 %	209.440
2	Pelaksanaan Promosi Investasi Petensi Daerah			2 Kali	2 Kali	0	2 Kali	100
	Prosentasi Indeks Kepuasan Masyarakat			85%	85%	85,14%	85,15%	100
3	Prosentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan sesuai dengan SOP			85%	90%	85%	108.1%	15.294
	Jumlah Aparatur yang telah mengikuti Diklat			5	5	0	0	100
	Meningkatnya Nilai SAKIP			BB	A	B		

2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD.

1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan, penyiapan informasi, jangkauan yang global dan transparan. Pada era Otonomi daerah guna menciptakan oodgovernment merupakan salah satu upaya nya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut dengan e-Govern.ment. pelayanan perizinan merupakan kegiatan yang sangat kompleks, perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan public. Dalam hal pelayanan perizinan dipengaruhi oleh beberapa factor yang sangat menentukan dalam rangka pencapaian pelyanan perizinan yang efektif.

Pelayanan perizinan dapat dilaksanakan apabila unsur yang terkait dalam proses yang terlibat dalam proses pelayanan dapat berperan dengan baik. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arahan dan tujuan dari penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana tertuang dalam Perda Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Jayapura.

Hal ini dapat dilihat dari hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas yaitu diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi perizinan, mempermudah dan mempercepat proses pelayanan perizinan serta tersedianya SOP, Profil dan Blosur perizinan.
 2. Tercapainya kerjasama dan Koordinasi dengan instansi terkait serta pemahaman informasi perizinan baik dilingkungan masyarakat ataupun dilingkungan pemerintahan.
 3. Terlaksananya penyusunan informasi perizinan dalam rangka pengembangan dan penertiban di kota Jayapura.
 4. Meningkatnya pelayanan informasi perizinan kepada masyarakat.
2. Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura dikaitkan dengan Visi dan Misi adalah:
- a. Masih kurangnya sumber daya aparatur yang berkualitas dan berkompeten pada bidang penanaman modal dan perizinan.
 - b. Belum terintegrasinya perizinan terkait dengan instansi/OPD Teknis secara optimal, karena tim teknis belum dapat disatukan pada satu gedung yang sama.
 - c. Belum optimalnya dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang melibatkan instansi teknis terkait, SOP yang sudah disusun harus dilakukan review supaya pelayanan prosedur perizinan yang disajikan dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah dan akurat.
 - d. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 1. Kurangnya ruang arsip perizinan dan nonperizinan sehingga arsip perizinan sejak tahun 2014 sampai tahun berjalan menumpuk di ruang sekretariat.
 2. Diperlukan penataan ruang antara ruang sekretariat, tim teknis OPD dan ruang penyimpanan arsip yang terpisah.

3. Pengembangan system teknologi informasi dan pelayanan perizinan online secara komprehensif dan berkelanjutan.
 4. Diperlukannya pembangunan Mall Pelayanan Terpadu guna mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan dan pelayanan publik secara optimal dan efisien.
 - e. Masih kurangnya inovasi pemberian pelayanan perizinan yang mempergunakan peninjauan lapangan, sehingga pelayanan perizinan masih belum efektif dan efisien.
 - f. Belum tersedianya data Penanam Modal PMA dan PMDN di wilayah Kota Jayapura, sehingga sampai tahun 2017 belum dapat diketahui nilai Investasi yang ada di wilayah Kota Jayapura.
3. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi.
- a. Pembaharuan metode aplikasi perizinan penanaman modal yang selalu berubah-ubah menyulitkan petugas dalam memberikan pelayanan perizinan penanaman modal, hal ini juga berdampak pada pengendalian dan pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal pendataan dan penertiban penanam modal baik PMA dan PMDN.
 - b. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas sumber daya aparatur harus terus ditingkatkan melalui Bimtek atau Diklat-Diklat Perizinan, guna mewujudkan pelayanan public yang cepat, efisien, efektif dan akuntabilitas.
 - c. Guna mewujudkan pelayanan public yang terpadu diperlukan Bangunan Gedung Pelayanan yang dapat mengakomodir semua instansi yang mengeluarkan perizinan paralel, supaya masyarakat dapat memperoleh pelayanan dengan optimal.
 - d. Penilaian masyarakat terhadap reformasi birokrasi pelayanan public dirasakan belum optimal, efektif, efisien dan akuntabel, karena masih adanya perizinan yang prosedur pengurusannya memerlukan waktu yang sangat lama dan tumpang tindih peninjauan lapangan sehingga menimbulkan pembiayaan yang cukup besar.
 - e. Akibat terbatasnya sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pelayanan perizinan akan mempengaruhi kinerja dan citra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan perizinan.
 - f. Akibat belum terlaksananya inovasi pemberian pelayanan perizinan dalam rangka memberikan kemudahan dan mempercepat pelayanan perizinan akan menghambat penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 secara konsisten.

4. Tantangan Dan Peluang.

Guna mewujudkan keberhasilan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura dan Misi ke 5 Walikota Jayapura yaitu “Mengembangkan Potensi Kota Sebagai Kota Jasa, Perdagangan, Pendidikan , Pariwisata dan Utilitas Kota yang Berwawasan Lingkungan”, maka perlukan dilakukan analisa pembangunan dengan metodologi analisa SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats) analisis adalah proses assessment yang subjektif pada suatu organisasi secara terstruktur untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang berupa kekuatan dan kelemahan serta factor peluang dan ancaman.

a. Kekuatan (Strength)

- Perubahan Kelembagaan berdasarkan Perda 5 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.
- Peraturan Daerah 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura PTSP dan Peraturan Walikota Jayapura Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.

b. Kelemahan (Weakness)

- Belum optimalnya Sumber daya Aparatur Penanaman Modal dan Perizinan sesuai keahlian di bidang masing-masing (belum Kompeten)
- Belum optimalnya Pelayanan Perizinan Secara Online
- Data Peluang investasi belum up to date
- Belum terdelegasikannya tim teknis dalam kantor DPMPTSP dari OPD teknis yang menerbitkan rekomendasi perizinan terkait.
- Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan perizinan.
- Masih adanya prosedur perizinan yang belum optimal terutama perizinan yang masih berada pada instansi teknis terkait.
- Pelayanan perizinan penanaman modal yang terkoneksi dengan program SPEPISSE dan diperbaharui lagi dengan OSS belum dapat terfasilitasi

secara optimal mengingat di Kota Jayapura baru tahun 2018 Bidang Penanaman Modal mulai dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

c. Peluang (Opportunity)

- Adanya kebijakan Nasional untuk mendukung penyelenggaraan penanaman modal yang terintegrasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Banyaknya Penawaran Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa Diklat dan Bimtek baik dari Lembaga /Departemen maupun non Departemen/swasta guna meningkat kompetensi Aparatur perizinan dan pelayana public.
- Adanya kebutuhan investor dan calon investor akan jasa layanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- Banyaknya tawaran pameran promosi investasi di dalam negeri maupun luar negeri.

d. Tantangan (Threat)

- Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi;
- Pasar bebas;
- Peraturan Mendagri Nomor 570 Tahun 2012 Tentang Percepatan Pemberian Izin dan Non Izin dan Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Belum semua data base penanaman modal dan perizinan terintegrasi dengan OPD terkait
- Belum tergalinya potensi perizinan di Kota Jayapura;
- Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan Usahanya.
- Belum optimalnya Inovasi Perizinan dan Pelayan Publik di wilayah Kota Jayapura.

Berdasarkan hasil analisa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan baik Walikota Jayapura, Legislatif serta Stekholder terkait, peningkatan organisasi kelembagaan dan pelaksanaan perizinan serta pelayanan public sesuai mutu standar yang telah ditetapkan yaitu cepat, mudah, transparan dan tepat waktu, diharapkan dapat mengatasi kelemahan, permasalahan dan dapat menjawab tantangan yang selama ini terjadi, serta dapat memanfaatkan peluang yang ada guna meningkatkan dan mengembangkan kualitas mutu pelayanan perizinan

kepada masyarakat dan pelaku dunia usaha (Indeks Kepuasan Masyarakat), sehingga akan terimplikasi terhadap pencapaian target kinerja dan peningkatan pendapatan daerah (PAD).

5. Formulasi Isu-Isu Penting.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura yang diamanatkan dalam RPJMD Kota Jayapura Tahun 2023-2026, yaitu meningkatkan jumlah dan nilai Investasi Penanam Modal Asing dan Penanam Modal Dalam Negeri, maka ditemui arah kebijakan yang menjadi prioritas pembangunan meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan dan pelayanan public (Public Service Excellence), khususnya prioritas pelayanan perizinan dan pelayanan public melalui penyelenggaraan PTSP, serta pengelolaan sumber daya aparatur pelayanan perizinan dan pelayanan public yang berbasis kompetensi perizinan dan teknologi informasi.
- b. Meningkatkan jumlah dan nilai investasi penanam modal baik Penanam Modal Asing (PMA) maupun Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui fasilitasi Perizinan dan Non Perizinan, serta meningkatkan kompetensi aparatur pada bidang penanaman modal, dengan harapan branding investasi penanam modal di wilayah Kota Jayapura terus meningkat.
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan pelayanan public melalui beberapa inovasi dan system informasi.

1.2. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berdasarkan rancangan awal yang disusun pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jayapura telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja OPD. Perencanaan kinerja merupakan proses dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Jayapura, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indicator kinerja sasaran, dan rencana fungsi DPMPTSP Kota Jayapura. Dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indicator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modan Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura. Rencana Kerja DPMPTSP Kota Jayapura tahun 2024 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Walikota Jayapura yang tertuang dalam RPJMD Kota Jayapura Tahun 2023 – 2026 sebagaimana yang diamanatkan pada misi ke 5 yaitu Mengembangkan potensi kota sebagai kota jasa, perdagangan, pendidikan, pariwisata dan utilitas kota yang berwawasan lingkungan. Dalam dokumen rencana kerja tahunan memuat sasaran, program/kegiatan, serta indicator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas dan fungsi dari DPMPTSP Kota Jayapura. Penjabaran dari rancangan awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura sesuai RKPD Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Reviuw RKPD

1.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Untuk mewujudkan keberhasilan pengembangan serta peningkatan pelayanan public yang menjadi tupoksi dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura dibutuhkan komitmen dari Kepala Daerah dan para stekholder Teknis terkait. Selain itu, komitmen serta dukungan DPRD juga sangat dibutuhkan karena merupakan faktor penentu untuk menunjang komitmen eksekutif, antara lain melalui dukungan peraturan dan menyetujui rencana program/kegiatan yang diusulkan.

Guna mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan Dinas penanaman Mdal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura telah disusun Rencana Strategis Tahun 2018-2022, yang dapat dijadikan acuan dalam memberikan usulan program/kegiatan pada tahun 2019. Rencana Program usulan pada tahun 2019 selain program rutinitas OPD juga disusulkan program yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016. Adapun usulan program kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan keberhasilan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kota Jayapura yang ditunjang oleh kegiatan-kegiatan administrasi perkantoran yang bersifat rutinitas.

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Program ini bertujuan untuk menunjang serta meningkatkan disiplin aparatur serta meningkatkan kapabilitas aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan sarana dan prasarana kantor dan aparatur guna mencapai target kinerja yang direncanakan pada program/kegiatan yang telah ditetapkan.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan serta meningkatkan pelayanan administrasi keuangan dan pelaporan dari OPD yang harus dilaporkan kepada OPD teknis terkait.

5. Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya Aparatur.

Program ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas serta kompetensi aparatur dalam menjalankan tugas/pekerjaan sesuai dengan bidang yang ditanganinya.

6. **Program Promosi Penanaman Modal**
Program ini bertujuan untuk mempromosikan potensi daerah guna meningkatkan jumlah Investasi dan nilai investasi Penanaman Modal baik Penanam Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri serta
7. **Program peningkatan Iklim Investasi Pelaksanaan Penanaman Modal.**
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perizinan sesuai dengan investasi yang ditanamamkan serta mengendalikan, mengawasi serta penertiban/pembinaan yang harus dilaksanakan oleh aparatur kepada masyarakat/investor.
8. **Program Pelayanan Penanaman Modal.**
Program ini bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan yang berbasis elektronik yang sudah menjadi arahan dari kementerian Dalam Negeri bahwa seluruh Kabupaten/Kota untuk mensegerakan pelaksanaan pendaftaran secara online (OSS), pada program tersebut didalam juga mengemban kegiatan pelayanan perizinan yang ada didaerah khususnya Kota Jayapura guna menggali pendapatan daerah.
9. **Program Pengendalian Penanaman Modal**
Program tersebut mengemban beberapa kegiatan terkait dengan naik/turunnya jumlah investor dan nilai investasi yang ada di Kota Jayapura, dengan adanya program pengendalian penanaman modal tersebut penanam modal yang ada di wilayah Kota Jayapura dapat di pantau dan diawasi sejauh mana perkembangannya, dan jika dilapangan ditemukan masalah atau kendala yang menghambat perkembangannya, dalam program ini memuat bagaimana pemecahan atau solusinya melalui pembinaan yang akan dilakukan oleh pemerintah.
10. **Program Pengelolaan Data Dan Sitem Informasi Penanaman Modal**
Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung dalam menyiapkan potensi sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana pendukung pelayanan public yang up-to date dengan berbagai strategis dan kebijakan baik yang kebijakan didaerah ataupun kebijakan nasional.
Untuk mensukseskan kinerja program-program sebagaimana tersebut diatas maka, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura mengusulkan beberapa kegiatan diantaranya:

Tabel 2.4

Usulan Program/Kegiatan DPMPTSP Kota Jayapura

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
Penunjang Urusan Pemerintahan	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	
	Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan daerah	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan/Semesteran
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Kantor
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
	Penyediaan Bahan/Material
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Oemerintah Daerah	
	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioal atau Lapangan
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensifikasi Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Intensif Dan Kemudahan Penanaman Modal
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
	Penyediaan Peta Potensi Dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
Program Promosi Penanaman Modal	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/kota
Program Pelayanan Penanaman Modal	
	Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal
	Penyediaan Layanan Konsultasi Dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Noperizinan
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Program Pengelolaan Data Dan Sitem Informasi Penanaman Modal	
	Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota
	Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil rumusan dan prioritas kegiatan dan mengacu ada hasil evaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah terealisasi pada tahun 2018-2022.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Jayapura Tahun 2024 terdiri dari 6 Program dan 12 kegiatan serta 34 sub kegiatan. Program/kegiatan/subkegiatan tersebut bertujuan memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan sesuai prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Jayapura Tahun 2024.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Moda Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura Tahun 2024 diharapkan dapat mewujudkan Visi dan Misi Walikota Jayapura Periode Tahun 2023-2026, pada bidang pelayanan public sebagai implementasi dari pengembangan potensi Kota Jayapura sebagai kota perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata, dan membangun utilitas yang berwawasan lingkungan.

Guna mensukseskan Rencana kerja DPMPTSP Kota Jayapura Tahun 2024, diperlukan dukungan serta kerjasama seluruh aparatur yang berada di DPMPTSP Kota Jayapura serta sekholder OPD Teknis terkait.